



## Manajemen Penanggulangan Bencana melalui Pengembangan Tagana Kolaboratif di Kabupaten Sumbawa Barat

Fatrianingsih<sup>1</sup>, Ahmad Yamin<sup>2</sup>, Diah Anggraini Hasri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [fatrianingsih11@gmail.com](mailto:fatrianingsih11@gmail.com), [ahmadyamin@uts.co.id](mailto:ahmadyamin@uts.co.id), [diah.anggraini.hasri@uts.ac.id](mailto:diah.anggraini.hasri@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-05  <b>Keywords:</b> <i>Management; Disaster Management; Tagana; Collaborative.</i>	<p>The objectives of this research are: 1) to analyze the management of natural disasters in the collaborative TAGANA program in West Sumbawa; 2) to develop the management of natural disasters in the collaborative TAGANA program in West Sumbawa. This research employs a descriptive qualitative research method. Data is collected through interviews with research subjects and literature reviews. The selection of research subjects is determined using purposive sampling techniques. Informants in the research include various stakeholders such as the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Department of Environment, the Department of Social Affairs, companies with interests in West Sumbawa Regency, and community groups represented by non-governmental organizations (NGOs) and civil society organizations. The research findings indicate that the collaborative management process for natural disasters through the Collaborative TAGANA program in West Sumbawa Regency involves Regulation and Legal Framework, Organizational Structure and TAGANA Roles, Actor Participation and Collaboration, Collaborative Forum Formation, Transparency, Accountability, and Decision-Making, Role and Responsibility Allocation, and Funding. Furthermore, the implementation of the Collaborative TAGANA in disaster mitigation in West Sumbawa Regency faces challenges in formalizing the principle of togetherness and establishing collaborative forums. In conclusion, the collaborative process in natural disaster management through the Collaborative TAGANA program in West Sumbawa Regency involves Regulation and Legal Framework, Organizational Structure and TAGANA Roles, Actor Participation and Collaboration, Collaborative Forum Formation, Transparency, Accountability, and Decision-Making, Role and Responsibility Allocation, and Funding.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-05  <b>Kata kunci:</b> <i>Manajemen; Penanggulangan Bencana; Tagana; Kolaboratif.</i>	<p>Tujuan penelitian ini; 1) untuk menganalisis manajemen bencana alam pada program tagana kolaboratif di Sumbawa Barat; 2) untuk mengembangkan manajemen bencana alam pada program tagana kolaboratif di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap subjek penelitian dan telaah literatur. Penentuan subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian adalah beberapa stakeholders seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, perusahaan dengan kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat, dan kelompok masyarakat yang diwakili oleh NGO dan LSM. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam manajemen bencana alam melalui program TAGANA Kolaboratif di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Regulasi dan Kerangka Hukum, Struktur Organisasi dan Peran TAGANA, Partisipasi Aktor dan Kolaborasi, Pembentukan Forum Kolaboratif, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengambilan Keputusan, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, dan Pendanaan. Selanjutnya, pelaksanaan TAGANA Kolaboratif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip kebersamaan secara formal dan pembentukan forum kolaboratif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Proses kolaborasi dalam manajemen bencana alam melalui program TAGANA Kolaboratif di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu, Regulasi dan Kerangka Hukum, Struktur Organisasi dan Peran TAGANA, Partisipasi Aktor dan Kolaborasi, Pembentukan Forum Kolaboratif, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengambilan Keputusan, Pembagian Peran Tanggung Jawab, dan Pendanaan.</p>

### I. PENDAHULUAN

Bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan serta keberlangsungan masyarakat. Kejadian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor alam, faktor

non-alam, dan faktor manusia, yang kemudian berakibat pada hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian materi, serta dampak psikologis (Isngadi & Khakim, 2021). Setiap tahun, Indonesia menghadapi bencana yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian yang signifikan yang diakibatkan bencana dimana mereka harus siap siaga setiap waktu, untuk itu pentingnya penanggulangan bencana di Indonesia (Setyowati, 2019). Oleh karena itu, penanganan bencana tidak hanya dapat bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat yang harus memiliki kesadaran penuh tentang fakta bahwa kita tinggal di wilayah yang rentan terhadap bencana. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya menangani bencana ini.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Setyowati, 2019). Pengetahuan menjadi faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan (Kurniawati, 2017). Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat memengaruhi sikap dan kepedulian untuk mengantisipasi bencana. Pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan suatu bencana guna untuk pencegahan serta mengurangi resiko bencana pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana (Zuliani & Hariyanto, 2021). Memahami risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum terjadinya bencana merupakan upaya proaktif yang bisa sangat efektif dalam mengurangi kerugian. Dalam hal ini, penyuluhan dan edukasi mengenai bencana berperan penting untuk membentuk kesadaran masyarakat dan memberikan dasar yang kuat untuk tindakan kesiapsiagaan yang efektif.

Tagana (Taruna Siaga Bencana) merupakan kelompok tugas yang berasal dari masyarakat dan terdiri dari relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran dalam bidang perlindungan sosial untuk mengatasi serta merespons upaya penanggulangan bencana (Zuliani & Hariyanto, 2021). Tagana adalah sebuah lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap situasi rawan bencana di Indonesia dan bertujuan untuk mengatasi tantangan dari perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Tagana beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lembaga ini didirikan

sebagai respons terhadap situasi rawan bencana yang sering melanda Indonesia. Dalam perkembangannya, Tagana telah mengalami perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana, dengan fokus pada perlindungan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, termasuk penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pemulihan pasca-bencana. Dengan peran penting mereka, Tagana berkontribusi dalam memitigasi risiko serta membantu dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Di masa lalu, pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di Indonesia merespons bencana dengan melakukan operasi pertolongan dan kesiapan menghadapi bencana. Namun, mereka menyadari bahwa aktivitas tersebut tidak cukup efektif. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sebuah kerangka kerja pengurangan risiko dan manajemen bencana alam berbasis komunitas yang lebih komprehensif. Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga fase, yaitu kesiapan dan mitigasi, respons darurat terhadap bencana, serta rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Tujuan utama dari kerangka kerja ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana alam di lingkungan (Belanawane S., 2015). Manajemen bencana harus dilakukan secara berurutan melalui ketiga tahap yang ada, sehingga persiapan segala kebutuhan yang diperlukan harus dilakukan oleh stake holder terkait sebelum bencana terjadi. Tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Menurut Paidi (2012) adapun tujuan dari manajemen bencana antara lain: mengurangi atau mencegah kerugian dalam hal kerusakan fisik, ekonomi, dan hilangnya nyawa yang dialami oleh individu, masyarakat, serta negara. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban bencana, mempercepat proses pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau individu yang kehilangan tempat tinggal saat kehidupan mereka terancam akibat bencana (Putra et al., 2015).

Penanggulangan bencana melalui pengembangan TAGANA merupakan sebuah inisiatif penting di Indonesia. Dengan latar belakang geografis yang rentan terhadap beragam bencana alam, sejarah bencana yang menyedihkan, serta kerentanan tinggi dari populasi yang terus tumbuh, TAGANA memiliki potensi besar dalam membantu negara menghadapi ancaman

bencana. Sebagai tim relawan masyarakat siaga bencana, TAGANA dapat berperan kunci dalam persiapan, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Namun, untuk mencapai potensinya, perlu dilakukan pengembangan kapasitas TAGANA, keterlibatan aktif masyarakat, koordinasi dengan badan penanggulangan bencana lainnya, serta pemanfaatan teknologi dan peningkatan kesadaran publik.

Oleh karena itu, Kabupaten Sumbawa Barat, yang rawan terhadap bencana alam, mengadopsi keempat tujuan tersebut untuk menangani bencana alam yang sering terjadi dengan menerapkan konsep manajemen kolaboratif yang didasarkan pada konsep administrasi publik. Dalam hal ini, kebutuhan untuk manajemen bencana termasuk SDM terlatih dan kompeten, anggaran memadai, serta ketersediaan sarpras (sarana dan prasarana) yang mendukung proses tersebut. Konsep administrasi mengacu pada kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti yang sering dilakukan oleh lembaga pemerintah atau negara. Hal ini sejalan dengan konsep kolaborasi dan manajemen bencana yang sedang ditekankan oleh pemerintah Sumbawa Barat dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar proses manajemen bencana, dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana. Kolaborasi antar pemangku kepentingan atau Collaborative governance adalah model pengelolaan pemerintahan di mana satu atau lebih entitas pemerintah (organisasi publik) bekerja sama secara aktif dengan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan bersama.

Pihak yang terlibat dalam manajemen bencana di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai leading sector, masyarakat, dan pihak swasta sebagai supporting system yang di istilahkan dengan program tagana kolaboratif. Mereka bekerjasama dalam berbagai tahapan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menerapkan manajemen bencana yang efektif untuk mengurangi dampak bencana di wilayah tersebut. Diharapkan, kolaborasi tersebut dapat membantu menanggulangi bencana alam sehingga bisa mengurangi kerugian di Masyarakat serta jumlah korban. Dalam penelitian ini, digunakan dua landasan teori, yakni Collaborative Governance dan Manajemen Bencana, untuk mengevaluasi proses kolaborasi

dalam manajemen bencana alam melalui program Tagana Kolaboratif di Kabupaten Sumbawa Barat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat Melalui Pengembangan Tagana Kolaboratif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, analisis makna yang terkandung dibalik angka, data, peristiwa, fenomena, atau gejala lebih ditekankan. Data dalam penelitian kualitatif berupa kata, kalimat, dan narasi yang disajikan secara sistematis untuk menggambarkan sebuah peristiwa, gejala, atau fenomena dengan menggunakan analisis teori dan konsep tertentu.

Data primer diperoleh dari responden yang memberikan informasi langsung tentang penanggulangan bencana melalui program Tagana Kolaboratif. Adapun sumber data primer penelitian ini berasal dari data kualitatif yang berasal dari Dinas Sosial, perusahaan dengan kepentingan di Kabupaten. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer yang terkumpul. Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu Dinas Sosial, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa Barat yang berpotensi untuk memperdalam analisis penelitian. Analisis data adalah suatu proses yang mencakup pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi yang bermanfaat, memberikan rekomendasi, merumuskan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dikelompokkan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data wawancara merupakan sumber data utama yang digunakan dalam proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen Bencana Alam Pada Program Tagana Kolaboratif di Sumbawa Barat berdasarkan pada regulasi mengenai penanganan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ada juga regulasi lain dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 82 Tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial jikadiperlukan. Serta Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.006 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada Dinas Sosial Di Kabupaten Sumbawa Barat Pertode 2023-2025.

Penanganan bencana memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari aspek formal dan non formal. Sesuai amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 82 Tentang Taruna Siaga bencana (TAGANA) mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial jika diperlukan. TAGANA Sumbawa Barat mempunyai fungsi antara lain:

1. Melaksanakan pendataan dan Pemetaan daerah rawan bencana
2. Menggerakkan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana
4. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana
5. Menjadi fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana'
6. Melakukan sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana
7. Melaksanakan evakuasi bersama pihak terkait atas ancaman bahaya kepada masyarakat.
8. Melaksanakan operasi tanggap darurat lebih terkonsentrasi pada bidang shelter dan logistik termasuk dapur umum
9. Melaksanakan upaya-upaya pemulihan sosial korban bencana;
10. TAGANA adalah personil relawan yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan tugas tanggap darurat. Tagana di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 36 orang yang di biyai oleh APBN dan APBD II.

Pendanaan untuk penanganan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat melibatkan beberapa sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan masyarakat dan bantuan sosial berupa hibah dari pihak swasta. Dalam pendanaan untuk penanganan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak

masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana mengikuti standar pelayanan minimal, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan adalah bagian dari upaya penyelenggaraan manajemen bencana. Selain itu, alokasi dana penanggulangan bencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tanpa tahun).

Dalam pengelolaan Tagana dengan pendekatan collaborative governance, terdapat beberapa aspek yang memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi antara pihak non-pemerintah dan berbagai entitas lainnya dalam manajemen penanggulangan bencana.

#### 1. Kondisi Awal

Pihak non-pemerintah memiliki peran penting dalam model collaborative governance dalam manajemen penanggulangan bencana. Mereka mampu memberikan dukungan sumberdaya manusia, finansial, dan informasi yang diperlukan dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana. Kontribusi ini membuktikan bahwa partisipasi pihak non-pemerintah adalah faktor penting dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana.

#### 2. Desain Kelembagaan

Kolaborasi dan keterlibatan pihak non-pemerintah dalam Tagana mengharuskan adanya kerjasama dengan berbagai entitas lainnya, termasuk masyarakat dan organisasi lain. Kerjasama lintas sektor ini memungkinkan penggabungan sumberdaya yang diperlukan dalam manajemen penanggulangan bencana. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan juga proses perencanaan dicapai melalui komunikasi terbuka dan keterlibatan dalam pertemuan atau diskusi. Ini memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki peran dalam proses tersebut.

#### 3. Fasilitas Kepemimpinan

Pihak non-pemerintah membawa kontribusi khusus dalam kerangka Tagana dengan memberikan dukungan sumberdaya manusia dan finansial yang sesuai dengan kemampuan dan kebijakan internal mereka. Kontribusi ini dapat melengkapi upaya pemerintah dalam manajemen penanggulangan bencana dan menghasilkan dampak yang lebih luas.

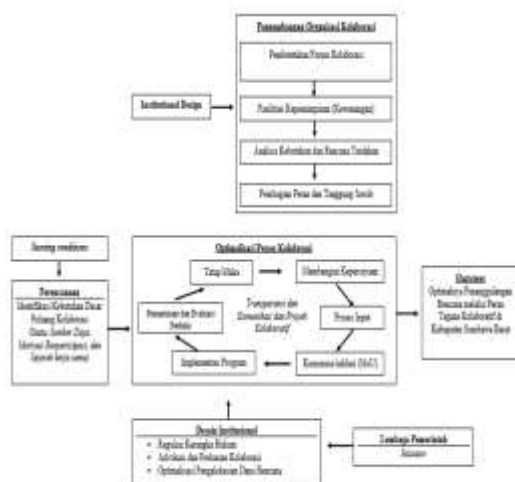
#### 4. Proses Kolaborasi

Tantangan yang mungkin muncul dalam kolaborasi ini mencakup tujuan yang berbeda dan prioritas yang kadang bertabrakan. Mengatasi tantangan ini memerlukan keterbukaan, komunikasi intens, dan pengertian tentang perbedaan tujuan dan prioritas. Namun, keberhasilan kolaborasi tercermin dalam keterlibatan PT. AMNT dalam kegiatan "Tagana Masuk Sekolah" yang membantu dalam peningkatan kesiagaan generasi muda dalam penanggulangan bencana, serta kontribusi dalam tanggap darurat dan layanan dukungan psikososial bagi penyintas bencana.

#### 5. Evaluasi dan Pembelajaran

Evaluasi dampak dan efektivitas peran pihak non-pemerintah dalam model collaborative governance dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terlibat. Kesuksesan kontribusi mereka diukur dari nilai positif, efektivitas, dan efisiensi yang tercapai dalam kegiatan-kegiatan kolaboratif.

Pesan yang ingin disampaikan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, adalah pentingnya kelanjutan kegiatan kolaboratif dalam manajemen penanggulangan bencana. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam membangun sinergi sumberdaya dan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam segala tahapan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dibuat inovasi model Manajemen Penanggulangan Bencana Melalui Pengembangan Tagana Kolaboratif di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:



**Gambar 1.** Inovasi Model Manajemen Penanggulangan Bencana melalui Tagana Kolaboratif

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen bencana alam dalam Program TAGANA Kolaboratif di Sumbawa Barat didasarkan pada serangkaian regulasi dan kerangka hukum yang mengatur penanganan bencana di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan lainnya. Program TAGANA ini memiliki peran krusial dalam melaksanakan berbagai tugas, mulai dari pendataan daerah rawan bencana hingga operasi tanggap darurat dan pemulihan sosial. Dalam pengelolaannya, TAGANA melibatkan sumber daya dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, serta bantuan dari pihak swasta dan masyarakat.

Dengan pendekatan pemerintahan kolaboratif, terlihat bahwa partisipasi pihak non-pemerintah, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat, memainkan peran yang penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi dalam manajemen penanggulangan bencana. Mereka memberikan sumber daya manusia, finansial, dan informasi yang mendukung berbagai tahap penanggulangan bencana. Desain kelembagaan yang melibatkan berbagai entitas, termasuk pemerintah, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan penggabungan sumber daya yang diperlukan. Terlebih lagi, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat.

Meskipun mungkin ada tantangan, seperti dalam mengimplementasikan prinsip kebersamaan secara formal dan pembentukan forum kolaboratif, perbedaan tujuan dan prioritas. Meskipun demikian, motivasi bersama terbangun melalui saling percaya, saling pengertian, legitimasi internal, dan komitmen bersama, kolaborasi ini terbukti efektif dalam membangun sinergi sumber daya dan mencapai tujuan bersama dalam manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pesan utama yang dapat disampaikan adalah pentingnya melanjutkan dan meningkatkan kegiatan kolaboratif dalam manajemen penanggulangan bencana, karena hal ini memiliki dampak positif dalam memperkuat kesiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana. Dengan kerjasama yang kokoh

antara pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat, kita dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi warga dari dampak bencana yang mungkin terjadi.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen bencana alam melalui Program TAGANA Kolaboratif di Sumbawa Barat, disarankan agar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, terus mengembangkan kerjasama yang lebih erat dan terkoordinasi. Upaya pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terhadap kolaborasi perlu ditingkatkan guna mengukur dampak positif dan efisiensi program. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para anggota TAGANA dan pihak non-pemerintah terlibat agar mereka lebih siap dalam menghadapi bencana dan dalam memenuhi peran mereka dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Upaya peningkatan kapasitas aksi bersama seperti tanggungjawab dalam pendataan, kemampuan teknis, dan cakupan bantuan sosial menjadi esensial untuk merespons bencana secara efektif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kolaboratif, perlu langkah-langkah konkret untuk memperkuat prinsip-prinsip kebersamaan, membangun struktur forum kolaboratif, dan meningkatkan kemampuan teknis serta cakupan bantuan sosial melalui kolaborasi lintas sektor

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Belanawane, S. (2015). Penguatan Kapasitas Komunitas dalam Manajemen Risiko Bencana Alam.
- Isnagadi, H., & Khakim, A. F. (2021). Analisis Risiko Bencana Dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana (Studi Kasus: Kabupaten Semarang).

Kurniawati, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang bencana gempa bumi di kecamatan Tanjung Barat Kabupaten Lombok Selatan.

Paidi. (2012). Manajemen Bencana: Pendekatan Interdisipliner.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanggulangan Krisis Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana

Putra, R. R., et al. (2015). Manajemen Penanganan Bencana Berbasis Kearifan Lokal.

Setyowati, Y. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Dan Mitigasi Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Zuliani, H., & Hariyanto, S. (2021). Penanganan Bencana Alam Dalam Kerangka Taruna Siaga Bencana (Tagana).